

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subsektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembangunan perekonomian Indonesia terutama sektor perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan unggulan nasional yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, kontributor penting terhadap pertumbuhan PDB nasional, dan devisa negara.

Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang cukup handal terhadap perubahan iklim sehingga membuat kemungkinan terjadinya gagal panen dapat diminimalisir. Kelapa sawit juga mengandung nutrisi yang tinggi dan baik bagi kesehatan manusia jika dilihat dari nilai kalori, vitamin, dan kadar kolestrolnya yang rendah. Jika dilihat dari fungsinya, kelapa sawit tidak hanya sebagai bahan pangan, kelapa sawit juga sebagai minyak nabati yang berpotensi untuk dijadikan bahan bakar biodiesel (Damanik dkk, 2010).

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan perkebunan di provinsi Jambi. Pengembangan kelapa sawit di Jambi berdampak positif dalam perekonomian dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan untuk mendorong pengembangan kelapa sawit secara baik agar dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit di provinsi jambi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan luas lahan dan produksi kelapa sawit 5 tahun terakhir di Provinsi Jambi dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
2016	110.340	338.302	18.931	467.573	1.010.393	2,987	210.684
2017	108.733	368.305	20.956	497.994	1.123.329	3,050	212.833
2018	108.046	376.374	22.042	506.462	1.142.078	3,034	221.711
2019	101.770	323.846	96.594	522.210	1.038.292	3,206	228.457
2020	108.009	318.791	99.949	526.749	983.497	3,085	229.807

Sumber : Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah luas areal kelapa sawit di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dengan luas areal sebesar 59.176 Ha dan rata-rata pertumbuhan sebesar 3% per tahun. Namun, peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit tidak di ikuti dengan peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, dimana produksi dan produktivitas mengalami fluktuasi.

Pengembangan luas areal kelapa sawit di Provinsi Jambi tidak terlepas dari perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di kabupaten. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tersebar luas di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kerinci. Luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Provinsi Jambi menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel2. Luas Lahan, Produksi dan Produktifitas Kelapa Sawit Rakyat Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2020

Kabupaten	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg//Ha)	Petani (KK)
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Batanghari	32.760	100.225	15.277	148.262	346.882	3.461	25.864
Muaro Jambi	26.863	163.887	40.737	231.487	375.553	2.292	66.171
Bungo	31.596	80.074	16.139	127.809	279.398	3.489	26.079
Tebo	17.395	67.354	9.479	94.228	204.187	3.032	18.926
Merangin	30.647	55.088	44.977	130.712	191.055	3.468	42.373
Sarolangun	17.098	63.124	7.522	87.744	168.879	2.675	21.296
Tanjab Barat	30.175	92.216	12.707	135.099	257.680	2.794	31.322
Tanjab Timur	12.188	53.222	6.641	72.050	116.503	2.189	11.715
Kerinci	65	19	-	84	14	737	40
Jumlah	198.787	675.210	153.478	1.027.476	1.940.151	2.873	234.786

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan luasan areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi seluas 231.487 ha berkontribusi 23% terhadap total luas lahan perkebunan kelapa sawit, dan menjadi kabupaten yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Jambi dan diikuti Kabupaten Batanghari yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 148.262 ha berkontribusi 14% serta diikutin Kabupaten Tanjab Barat dengan luas areal 135.099 ha berkontribusi 13%.

Kabupaten Muaro Jambi komoditas pertanian yang banyak diusahakan petani dan memegang peranan penting adalah perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Muaro Jambi dari sekian banyak komoditas perkebunan lainnya. Jika dilihat dari usaha perkebunan sawit Kabupaten Muaro Jambi memiliki lahan terluas dibandingkan dari Kabupaten yang lainnya serta jumlah produksi yang paling banyak dari yang lainnya. Ini menunjukkan betapa besarnya produksi komoditas sawit untuk dikembangkan guna menopang perekonomian rakyat.

Pentingnya perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi khususnya Kecamatan Sekernan dapat dilihat dari luasan lahan dan jumlah petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sekernan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020

Muaro Jambi	Luas Areal/Area (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani
	TBM	TM	TTM	Jumlah			
Jambi Luar Kota	683	4.363	5.660	10.706	16.360	3.750	4.357
Sekernan	3.570	21.798	2.146	27.514	58.010	2.661	11.768
Kumpeh Ilir	1.167	13.501	372	15.040	27.763	2.056	7.410
Muaro Sebo	3.509	6.301	-	9.810	15.235	2.418	4.729
Mestong	866	379	-	1.245	970	2.559	782
Kumpeh Ulu	258	3.209	-	3.467	6.689	2.084	1.947
Sungai Bahar	1.777	14.075	-	15.852	42.542	3.023	8.670
Sungai Gelam	1.631	14.670	9.959	26.260	33.689	2.296	12.888
Bahar Selatan	477	2.728	5.726	8.931	7.473	2.739	2.371
Bahar Utara	87	2.361	5.566	8.014	6.225	2.637	2.602
Taman Rajo	1.253	6.579	732	8.564	17.769	2.701	4.602
Jumlah	15.278	89.964	30.161	135.403	232.725	2.587	61.905

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 3 menunjukkan luasan areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sekernan sebesar 27.514 ha berkontribusi 20% terhadap luas perkebunan kelapa sawit di Muaro Jambi dan menjadikannya yang terluas, diikuti dengan Kecamatan Sungai Gelam sebesar 26.260 ha berkontribusi 19% serta diikuti dengan Kecamatan Sungai Bahar sebesar 15.852ha berkontribusi 12%.

Kecamatan Sekernan memiliki potensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan banyaknya jumlah petani yakni 11.768 petani dan dilihat dari luas areal yang dimilikinya seluas 27.514 ha dan produksi sebesar 58.010 ton yang menjadikannya Kecamatan dengan luas lahan terluas dan jumlah produksi terbesar di Kabupaten Muaro Jambi. Namun jika dilihat dari jumlah produktivitas, Kecamatan Sekernan memiliki produktivitas sebesar 2.661 kg/ha, lebih rendah

dibandingkan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota yang produktivitasnya sebesar 3.750 kg/ha dan Kecamatan Sungai Bahar sebesar 3.023 kg/ha.

Tingginya keinginan masyarakat untuk melakukan usahatani kelapa sawit adalah untuk mendapatkan penghasilan dan menjadi salah satu penyebab bertambahnya luas lahan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sekernan. Petani di Kecamatan Sekernan ada yang bermitra dengan perusahaan inti dengan menjadi petani plasma dan ada juga yang memiliki lahan dan berusahatani kelapa sawit sendiri yaitu petani swadaya.

Petani plasma berbeda dengan petani swadaya baik dilihat dari harga TBS maupun produksi. Petani plasma merupakan petani yang mengelola kebun sendiri dan memiliki hubungan kemitraan dengan sebuah perusahaan perkebunan yang menanamkan modal atas hak guna lahan namun petani tetap mendapatkan pendampingan teknik budidaya dan kepastian pembeli TBS oleh pabrik kelapa sawit, dengan adanya pendampingan dari perusahaan produktifitas kelapa sawit yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan kebun inti yang dikelola oleh perusahaan.

Petani swadaya merupakan petani yang membudidayakan tanaman kelapa sawit secara mandiri tidak memiliki kemitraan dengan pihak lain, khususnya perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan sumber pendanaan dan pengelolaan sendiri. Selain itu pengelolaan kebun tidak mendapatkan pendampingan dalam teknik budidaya sehingga kualitas dan kuantitas TBS yang dihasilkan seringkali dianggap rendah oleh pihak pabrik yang berakibat pada rendahnya harga jual TBS. Padahal banyak diantara petani swadaya telah

memiliki pengalaman sebagai plasma dan sudah meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan besar dalam teknik budidaya. Mereka paham akan bibit unggul bersertifikasi, paham bahwa kelapa sawit perlu perawatan intensif, sehingga kualitas dan kuantitas tidak jauh berbeda dari apa yang diperoleh oleh petani plasma. Akan tetapi persepsi tentang kebun milik petani swadaya sudah terlanjur *under estimate* hingga pabrik memperlakukan secara diskriminatif terkait harga jual TBS petani swadaya dengan harga yang lebih rendah dari harga TBS petani plasma atau yang bermitra yang bernaung di bawah KUD. Apalagi di dalam proses pemasaran TBS, petani swadaya tidak menjadi bagian dari KUD yang bermitra dengan pihak Pabrik. Dalam posisi ini TBS petani harus melewati beberapa lembaga pemasaran non KUD untuk sampai ke pabrik, sehingga tercipta margin yang berimbas pada rendahnya harga yang diterima petani.

Keunikan pasar tandan buah segar (TBS) dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya di Indonesia adalah dalam penetapan harga TBS pemerintah melakukan pengendalian harga. Hal ini tercermin dari adanya peraturan Menteri yang mengatur tentang mekanisme penetapan harga TBS, mulai dari keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 627 Tahun 1998, direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 395 Tahun 2005 dan Permentan nomor 17 Tahun 2010 serta yang terakhir Permentan nomor 1 Tahun 2018. Tujuan utama dari terbitnya Permentan tersebut adalah memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar bagi pekebun dari TBS kelapa sawit dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 Tahun 2018 pemerintah daerah yaitu Gubernur membentuk Tim Penetapan Harga TBS ditingkat Provinsi

yang beranggotakan wakil petani (Asosiasi Petani), unsur instansi pemerintah daerah, pelaku industri kelapa sawit, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi (Rainun, 2018). Salah satu tugas Tim tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 2 Permentan nomor 1 Tahun 2018 merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks “K” dan harga patokan TBS, dalam menetapkan indeks “K” dan sekurang-kurangnya dua minggu sekali, di Provinsi Jambi Tim Penetapan Harga TBS pada awalnya bekerja dua minggu sejak akhir tahun 2011. Namun sekarang, Tim ini bekerja menetapkan harga setiap minggu tepatnya setiap hari kamis dan penentuan indeks “K” setiap bulan.

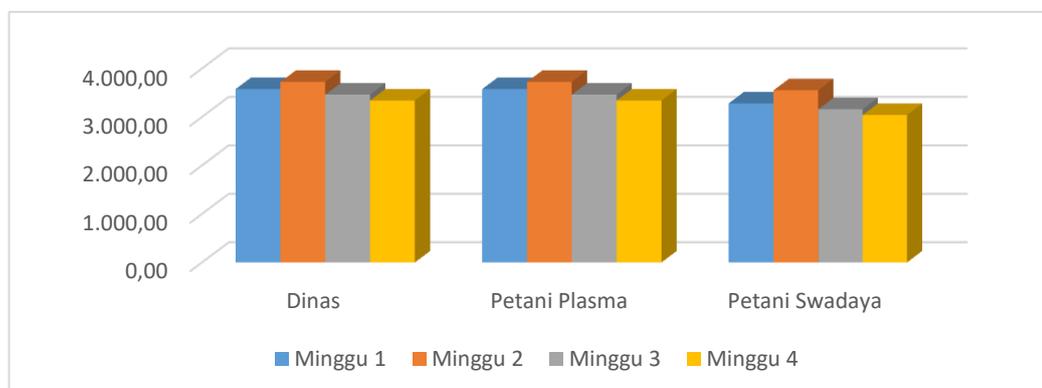
Penyebab rendahnya harga TBS yang diterima oleh petani karena petani yang cenderung memanen pada usia muda sehingga rendemen yang dihasilkan tidak sesuai dengan standart Pabrik Kelapa Sawit (PKS), standart PKS 20-22% rendemen yang mengakibatkan TBS yang dimiliki petani tidak dapat langsung dijual ke PKS melainkan menjualnya ke pedagang besar dan pedagang pengumpul dengan kriteria yang dimiliki bukanlah berdasarkan umur tanaman tetapi berdasarkan tonase. Selain itu fenomena yang terjadi di lokasi penelitian adalah kondisi sarana dan prasarana di area perkebunan rakyat yang belum memadai sehingga biaya untuk pengangkutan (Distribusi) menjadi besar.

Adanya perbedaan harga jual kelapa sawit artinya petani hanya sebagai *price taker* dimana harga ditentukan oleh pedagang. Coughlan *et al.*, (2006) menjelaskan bahwa saluran yang tepat dapat dibangun dalam beberapa metode saluran pemasaran yang efektif dan efisien. Petani harus memilih pembeli yang paling menguntungkan untuk mengoptimalkan saluran pemasarannya. Namun

masih banyak petani yang memilih untuk menjual TBS nya dengan lembaga pemasaran yang tidak tepat sehingga terjadi inefisiensi terhadap saluran pemasaran.

Pemasaran dikatakan efisien jika telah memenuhi syarat yaitu mampu menyampaikan hasil atau produk dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu melakukan pembagian yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran (Rangkuti.A,dkk. 2018).

Berdasarkan penetapan keputusan harga TBS oleh Permentan dan pemerintah Provinsi Jambi dengan tujuan melindungi pekebun dalam memperoleh harga TBS yang wajar namun tidak diikuti dengan harga yang diterima oleh petani kelapa sawit swadaya yang lebih rendah dibandingkan dengan petani kelapa sawit plasma. Berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi di Dinas Perkebunan pada bulan Maret tahun 2022 berbeda dengan dengan harga yang diterima oleh petani kelapa sawit swadaya, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Variasi Harga TBS bulan Maret 2022

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2022 dan Loading Point, 2022

Berdasarkan Gambar 1 dari data yang ada terdapat variasi harga dari masing-masing petani dimana petani swadaya menerima harga yang lebih rendah. Harga TBS yang diterima petani swadaya memiliki selisih Rp.200-300/kg dengan petani plasma. Berdasarkan uraian latar belakang dengan beberapa data yang telah dikemukakan maka dapat memperkuat alasan peneliti untuk mengangkat dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga TBS Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir memiliki luas areal dan produksi kelapa sawit yang cukup meningkat tiap tahunnya, tetapi produktivitasnya mengalami fluktuasi. Penyebaran kelapa sawit di Provinsi Jambi terdapat di Sembilan kabupaten. Kabupaten Muaro Jambi merupakan Salah satu Kabupaten yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit terluas dengan tingkat produktivitas ke-enam di Provinsi Jambi.

Kecamatan Sekernan merupakan Kecamatan yang memiliki produksi yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kelapa sawit rakyat diusahakan oleh petani kelapa sawit yang terdiri dari petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma merupakan petani mitra dari perkebunan inti yang memperoleh bimbingan dan pengawasan oleh mitra, sedangkan petani swadaya adalah petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit secara mandiri mulai dari pendanaan, pengelolaan, pemeliharaan, panen hingga pemasaran dengan membudidayakan kelapa sawit mandiri sehingga kualitas dan kuantitas masih diragukan.

Harga TBS yang diterima oleh petani kelapa sawit swadaya lebih rendah dibandingkan dengan petani kelapa sawit plasma. Penyebab rendahnya harga TBS yang diterima oleh petani karena petani yang cenderung memanen pada usia muda sehingga rendemen yang dihasilkan tidak sesuai dengan standart Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mengakibatkan TBS yang dimiliki petani tidak dapat langsung dijual ke PKS melainkan menjualnya ke pedagang besar dan pedagang pengumpul dengan kriteria yang dimiliki bukanlah berdasarkan umur tanaman tetapi berdasarkan tonase.

Selain faktor-faktor diatas yang mempengaruhi harga TBS, saluran pemasaran kelapa sawit sangat mempengaruhi harga TBS. Saluran pemasaran yang merupakan tujuan pemasaran TBS merupakan serangkaian pengaliran TBS dari produsen pada konsumen akhir, banyaknya lembaga yang dilalui akan membentuk margin dan mempengaruhi harga yang diterima oleh produsen atau petani. Semakin banyak lembaga yang dilewati dalam pemasaran akan menurunkan harga TBS yang diterima petani. Selain itu lokasi kebun dengan pabrik kelapa sawit terdekat dipertimbangkan karena semakin jauh jarak lokasi kebun biaya pemasaran akan semakin tinggi dan harga yang diterima petani akan rendah.

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya variasi harga yang diterima petani plasma dan petani swadaya, perbandingan tersebut mencerminkan tidak adanya harga baku yang ditetapkan pembeli (PKS, pedagang), sedangkan pemerintah sudah menetapkan acuan penetapan harga TBS melalui surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1 / PERMENTAN / KB. 120 / 1 / 2018. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu Gubernur membentuk tim

dalam penentuan harga TBS sebagai acuan setiap minggu tepatnya pada hari Kamis dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga TBS yang wajar dan menghindari persaingan tidak sehat diantara perusahaan perkebunan, namun penetapan harga oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tidak diikuti dengan harga yang diterima oleh petani swadaya dilapangan yang lebih rendah Rp.200-300/kg dengan petani plasma.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemasaran dan harga yang diterima oleh petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pengaruh kualitas bibit, jumlah pupuk, jarak kebun ke PKS, umur tanaman, tujuan pemasaran TBS (pabrik kelapa sawit, *Loading point* pedagang pengumpul) terhadap Harga TBS petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pemasaran dan harga yang diterima oleh petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas bibit, jumlah pupuk, jarak kebun ke PKS, umur tanaman, tujuan pemasaran TBS (pabrik kelapa sawit, *Loading point*, pedagang pengumpul) terhadap harga TBS petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Untuk penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Untuk Petani, diharapkan petani lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan harga TBS rendah, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan memperoleh harga TBS yang lebih tinggi khususnya ditunjukkan kepada petani kelapa sawit swadaya.